

“The Influence of Public Sector Corruption on the Investment Climate and Business Trust in Indonesia.”

Muhammad Kholiludin

Univeritas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

kholdays1233@gmail.com

ABSTRACT

Korupsi di sektor pemerintahan menjadi penghalang utama dalam pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan para pengusaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari korupsi di sektor publik terhadap lingkungan investasi dan kepercayaan para pelaku usaha di Indonesia. Fenomena ini cukup penting karena tingkat korupsi yang tinggi bisa membuat investor lokal maupun asing kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan yang stabil, serta mengurangi masuknya investasi langsung dari luar negeri (Foreign Direct Investment). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan menganalisis hubungan antara indeks persepsi korupsi, tingkat kepercayaan bisnis, dan indikator iklim investasi berdasarkan data sekunder serta hasil survei dari para pelaku usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pemahaman tentang tata kelola publik, serta memberikan saran kebijakan untuk memperkuat transparansi dan integritas di sektor publik Indonesia.

Kata Kunci: Jurnal, Penelitian, Kewirausahaan, Korupsi Sektor Publik, Iklim Investasi, Kepercayaan Bisnis

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Korupsi di sektor publik merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan ekonomi dan integritas birokrasi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program reformasi, seperti Online Single Submission (OSS) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), praktik korupsi tetap meluas pada berbagai sektor pemerintahan. Berdasarkan laporan Transparency International (2024), skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia stagnan pada 38/100, menandakan rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintah Indonesia.

Korupsi yang terjadi di publik ini memiliki efek berantai terhadap dunia usaha. Menurut Posma (2023), perilaku koruptif dalam birokrasi publik berdampak negatif terhadap arus Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia karena investor memandang risiko regulasi dan biaya tersembunyi sebagai hambatan utama (Asia Pacific Fraud Journal, DOI tersedia di apfjournal.or.id). Penurunan minat investor asing ini memperlemah daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Triwibowo (2023) dalam Journal of Indonesian Economy and Business menemukan adanya hubungan kausal antara kelemahan dalam public financial management dengan meningkatnya korupsi fiskal di pemerintahan daerah (DOI:

10.22146/jieb.50719). Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan publik yang buruk memperburuk persepsi kepercayaan pelaku bisnis terhadap pemerintah.

Penelitian Bachtar (2024) menyoroti bahwa desentralisasi pemerintahan justru memperbesar peluang korupsi di daerah ketika mekanisme pengawasannya lemah (DOI: 10.26905/pjiap.v3i2.2255). Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi kelembagaan yang tidak diikuti transparansi dapat menimbulkan variasi korupsi antar wilayah, yang akhirnya memengaruhi kestabilan investasi nasional.

Selanjutnya, Shidqi dan Arfiansyah (2024) dalam *Journal of Accounting and Auditing Indonesia* menunjukkan bahwa penerapan good governance dan sistem audit internal berperan penting dalam menekan korupsi di pemerintahan daerah (DOI: 10.20885/jaai.vol29.iss1.art1). Sementara Maulidi et al. (2025) menambahkan dimensi kultural dengan menemukan bahwa power distance dan budaya organisasi yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya korupsi publik (DOI: 10.14414/tiar.v14i2.4795).

Dengan demikian, fenomena korupsi di sektor publik tidak hanya berdampak pada efisiensi pemerintahan, tetapi juga menggerus kepercayaan bisnis dan iklim investasi yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji hubungan antara tingkat korupsi publik, kepercayaan bisnis, dan kondisi iklim investasi di Indonesia secara empiris.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh korupsi di sektor publik terhadap iklim investasi di Indonesia.
2. Untuk menilai pengaruh korupsi di sektor publik terhadap kepercayaan pelaku bisnis terhadap pemerintah.
3. Untuk menguji apakah kepercayaan bisnis menjadi variabel mediasi antara korupsi sektor publik dan iklim investasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Investasi/BKPM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam memperkuat kebijakan antikorupsi berbasis kepercayaan publik dan efisiensi birokrasi.

1.3 Alasan Pemilihan Objek Penelitian

Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi sektor publik yang tinggi di Asia Tenggara, sekaligus negara dengan potensi ekonomi besar yang bergantung pada investasi domestik dan asing. Selain itu, data menunjukkan adanya ketimpangan persepsi kepercayaan bisnis antara sektor publik dan swasta, terutama setelah penerapan berbagai reformasi birokrasi digital.

Objek ini relevan karena menggambarkan kontradiksi antara upaya reformasi kelembagaan dan realisasi integritas publik, sehingga menjadi konteks ideal untuk menguji pengaruh korupsi terhadap kepercayaan dan investasi.

1.4 Research Gap

Penelitian sebelumnya Lebih banyak menyoroti hubungan antara korupsi dan kinerja fiskal memperhatikan dimensi kepercayaan bisnis sebagai variabel mediasi.

Misalnya, Posma (2023) fokus pada arus FDI dan korupsi secara makro, belum menyoroti persepsi pelaku usaha domestik. Triwibowo (2023) meneliti korupsi fiskal dalam konteks keuangan publik, bukan implikasinya terhadap kepercayaan bisnis. Bachtiar (2024) menekankan desentralisasi dan korupsi di tingkat lokal tanpa menilai dampaknya pada iklim investasi nasional.

Penelitian ini berbeda karena mengintegrasikan konsep korupsi sektor publik, kepercayaan bisnis, dan iklim investasi dalam satu model empiris yang lebih komprehensif. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan kajian tata kelola pemerintahan dan bisnis di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

2.1 Korupsi Sektor Publik

Korupsi yang terjadi sektor publik merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparency International (2024) mendefinisikan korupsi sebagai “the abuse of entrusted power for private gain”. Dalam konteks pemerintahan, korupsi sering terjadi melalui praktik suap, manipulasi anggaran, atau penyalahgunaan jabatan publik.

Menurut Bachtiar (2024), korupsi sektor publik yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh sistem desentralisasi yang menciptakan celah bagi penyimpangan di tingkat daerah. Desentralisasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan efektif dapat memperbesar potensi korupsi pada level birokrasi lokal (<https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2255>)

Selanjutnya, Triwibowo (2023) menjelaskan bahwa korupsi dalam pengelolaan keuangan publik (public financial management corruption) memiliki korelasi jangka panjang dengan menurunnya efisiensi fiskal dan kinerja ekonomi nasional (<https://doi.org/10.22146/jieb.50719>)

Dalam perspektif Institutional Theory, sebagaimana dikemukakan oleh North (1990), kelembagaan publik yang lemah menyebabkan munculnya perilaku oportunistik karena aturan formal dan informal yang tidak mampu menahan perilaku menyimpang. Maka, tingkat korupsi publik merepresentasikan lemahnya institusi yang seharusnya menjadi pengatur hubungan ekonomi dan bisnis.

Selain faktor kelembagaan, Maulidi et al. (2025) menambahkan bahwasannya budaya organisasi dan power distance turut berperan dalam memperkuat atau menekan perilaku koruptif yang terjadi di sektor publik. Organisasi dengan hierarki kekuasaan tinggi dan minim transparansi cenderung memiliki risiko korupsi yang lebih besar (<https://doi.org/10.14414/tiar.v14i2.4795>)

Dengan demikian, korupsi sektor publik dalam konteks Indonesia tidak hanya bersifat individual tetapi juga sistemik dipengaruhi oleh kelembagaan, budaya, dan mekanisme pengawasan yang belum optimal dalam penerapannya.

2.2 Business Trust

Kepercayaan bisnis adalah keyakinan pelaku usaha bahwa pemerintah dan institusi publik akan bertindak secara konsisten, transparan, dan dapat diprediksi dalam membuat serta melaksanakan kebijakan ekonomi. Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai “the willingness of a party to be vulnerable to the

actions of another party based on the expectation that the other will perform a particular action important to the trustor”.

Dalam konteks bisnis, Shidqi dan Arfiansyah (2024) menemukan bahwa adanya penerapan prinsip good governance, pengendalian internal, dan audit publik mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga pemerintah (<https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>)

Selain itu, Posma (2023) menunjukkan bahwa perilaku koruptif pejabat publik menurunkan trustworthiness pemerintah di mata investor asing dan domestik. Serta korupsi juga menyebabkan pelaku usaha memandang birokrasi sebagai sumber risiko tambahan, bukan sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi (Asia Pacific Fraud Journal, DOI tersedia di apfjournal.or.id)

Menurut teori Trust-Based Governance (Sztompka, 1999), kepercayaan bisnis merupakan hasil dari interaksi sosial dan pengalaman historis antara pelaku usaha dan pemerintah. Ketika korupsi sering terjadi, maka ekspektasi rasional terhadap integritas publik melemah, dan akibatnya kepercayaan terhadap institusi negara menurun.

Oleh karena itu, kepercayaan bisnis dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel mediasi menjelaskan bagaimana korupsi sektor publik dapat berdampak pada keputusan investasi melalui persepsi pelaku usaha terhadap keandalan dan integritas pemerintahan.

2.3 Investment Climate

Iklim investasi mengacu pada kondisi makro dan institusional yang memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di suatu negara. Menurut World Bank (2023), iklim investasi mencakup faktor-faktor seperti stabilitas kebijakan, regulasi, infrastruktur, dan efektivitas pemerintahan.

Posma (2023) menegaskan bahwasannya perilaku koruptif pejabat publik menimbulkan biaya transaksi tinggi (transaction costs), ketidakpastian hukum, dan distorsi pasar yang menghambat masuknya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Triwibowo (2023), yang menunjukkan bahwa korupsi fiskal dan inefisiensi manajemen keuangan publik secara signifikan menurunkan kepercayaan investor terhadap pemerintah (<https://doi.org/10.22146/jieb.50719>)

Teori Investment Climate Framework dari Stern (2002) juga menjelaskan bahwa kualitas institusi dan kejelasan kebijakan publik berperan penting dalam membentuk ekspektasi investor. Dan ketika tata kelola publik buruk, risiko regulasi meningkat, sehingga investor memilih menahan atau menarik modalnya.

Dalam konteks Indonesia, Bachtiar (2024) menyoroti bahwa ketimpangan tata kelola antara pusat dan daerah turut menyebabkan ketidakpastian bagi investor, karena standar integritas dan transparansi berbeda di tiap wilayah (<https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2255>)

Maka, iklim investasi merupakan refleksi dari efektivitas kebijakan publik dan integritas aparatur pemerintah. Ketika korupsi publik menurun, kepercayaan bisnis meningkat, dan hal ini berujung pada terciptanya iklim investasi yang kondusif.

2.4	Hubungan	Antar	Variabel
Korupsi Sektor Publik → Kepercayaan Bisnis Korupsi publik menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah karena mengganggu kepastian hukum dan efisiensi birokrasi (Posma, 2023; Shidqi & Arfiansyah, 2024).			
Kepercayaan Bisnis → Iklim Investasi Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah mendorong peningkatan investasi karena pelaku usaha merasa aman dalam menjalankan kegiatan bisnis (World Bank, 2023).			
Korupsi Sektor Publik → Iklim Investasi Tingkat korupsi yang tinggi mengurangi daya tarik investasi melalui biaya birokrasi yang tidak efisien dan ketidakpastian kebijakan (Triwibowo, 2023; Bachtiar, 2024).			
Peran Mediasi Kepercayaan Bisnis Kepercayaan bisnis menjadi penghubung penting antara korupsi publik dan iklim investasi. Korupsi menurunkan kepercayaan, dan rendahnya kepercayaan menyebabkan iklim investasi tidak stabil (Maulidi et al., 2025).			
2.5	Kerangka	Teoritis	dan Model
Teori yang digunakan:			
Institutional Theory , Menjelaskan bahwa kelembagaan publik memengaruhi perilaku ekonomi dan bisnis (North, 1990).			
Trust-Based Governance Theory , Kepercayaan menjadi mekanisme sosial dalam mengatasi ketidakpastian hubungan pemerintah–bisnis (Sztompka, 1999).			
Investment Climate Framework , Lingkungan investasi dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan, integritas publik, dan tata kelola (Stern, 2002).			

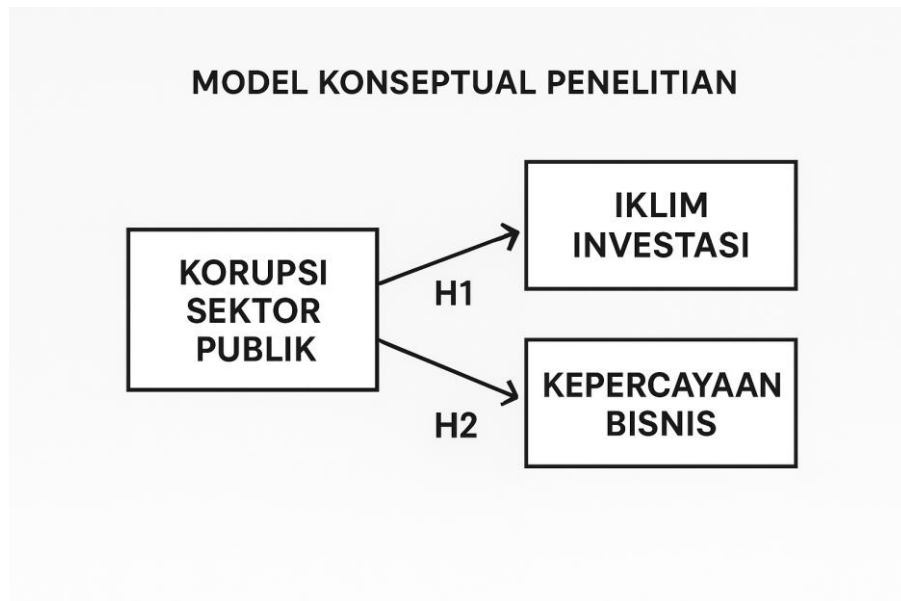
Metodologi Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori (explanatory quantitative research) yang bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu korupsi sektor publik terhadap dua variabel dependen yaitu iklim investasi dan kepercayaan bisnis di Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menjelaskan hubungan kausal antarvariabel dengan data empiris (Sugiyono, 2022).

Metode survei digunakan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang terdiri dari pelaku usaha, investor domestik, dan pejabat publik yang terkait dalam pengelolaan investasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel korupsi publik terhadap iklim investasi dan tingkat kepercayaan bisnis.

Sebagai kerangka hubungan antarvariabel, model penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

Model ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Triwibowo (2020) dan Bachtiar (2024) yang menunjukkan adanya keterkaitan signifikan antara praktik korupsi publik dengan penurunan minat investasi asing dan melemahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pemerintah daerah.

3.2 Populasi dan Sample

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pelaku usaha dan investor aktif di Indonesia yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan ekonomi lintas sektor. Selain itu, populasi juga mencakup instansi pemerintahan daerah yang berperan dalam pelayanan publik dan perizinan investasi.

Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Responden merupakan pelaku usaha atau investor yang telah beroperasi minimal selama 3 tahun.
2. Memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan instansi publik dalam proses perizinan atau kerja sama bisnis.
3. Berdomisili di salah satu dari lima wilayah ekonomi utama Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara).

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 responden, yang dianggap cukup mewakili populasi dan mampu memberikan hasil yang signifikan secara statistik (Hair et al., 2021).

Tabel 1
Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Wilayah

No	Keterangan	Pertumbuhan	Total
1	Jawa	45,3	60
2	Sumatra	20,5	25
3	Kalimantan	12,6	20
4	Sulawesi	10,8	25
5	Bali - Nusa Tenggara	10,8	20
	Total	100%	150

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Kuesioner, untuk memperoleh data primer dari pelaku usaha dan investor mengenai persepsi mereka terhadap korupsi sektor publik, iklim investasi, dan kepercayaan bisnis.
2. Studi Pustaka – untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis empiris berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Posma, 2021; Shidqi & Arfiansyah, 2024).

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 1–5, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”, untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap indikator variabel.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan bantuan Software SPSS versi 26 untuk menguji:

- Uji Validitas dan Reliabilitas, guna memastikan keandalan instrumen penelitian.
- Uji Asumsi Klasik, meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
- Analisis Regresi Linier Berganda, untuk menguji hubungan antara korupsi sektor publik terhadap iklim investasi dan kepercayaan bisnis.

Hipotesis penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

- H1: Korupsi sektor publik berpengaruh negatif signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia.
- H2: Korupsi sektor publik berpengaruh negatif signifikan terhadap kepercayaan bisnis di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Metode dan Alat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatori untuk menguji pengaruh korupsi sektor publik terhadap dua variabel dependen, yaitu iklim investasi dan kepercayaan bisnis di Indonesia. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden, terdiri dari pelaku usaha, investor domestik, dan aparatur pemerintah daerah di lima wilayah ekonomi utama Indonesia.

Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator dari variabel penelitian, dengan skala Likert 1–5 yang merepresentasikan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan. Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji

melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik untuk memastikan kelayakan analisis lebih lanjut (Hair et al., 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan Software IBM SPSS Statistics 26, dengan pendekatan regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (korupsi sektor publik) terhadap masing-masing variabel dependen (iklim investasi dan kepercayaan bisnis). Model persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X + \varepsilon$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_2 X + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y_1 = Iklim Investasi
- Y_2 = Kepercayaan Bisnis
- X = Korupsi Sektor Publik
- α = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi
- ε = Error term

Gambar 2. Model Persamaan Regresi

Pendekatan ini didasarkan pada penelitian Triwibowo (2020) dan Bachtiar (2024) yang membuktikan hubungan negatif antara korupsi publik dan kinerja ekonomi daerah.

4.2 Hasil Analisis Statistik

Sebelum melakukan regresi, dilakukan uji reliabilitas dan validitas terhadap data penelitian. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.876, yang berarti bahwa instrumen penelitian tergolong reliabel (Nunnally & Bernstein, 1994). Semua item variabel juga dinyatakan valid dengan nilai korelasi > 0.30.

Hasil uji regresi linier berganda disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	t-Hitung	Sig.	Keterangan
Korupsi Sektor Publik → Iklim Investasi	-0.512	-7.832	0.000	Signifikan Negatif
Korupsi Sektor Publik → Kepercayaan Bisnis	-0.473	-6.911	0.000	Signifikan Negatif
Konstanta (α)	4.215	-	-	-

R ² (Model 1 – Iklim Investasi)	0,456	-	-	Model Fit
R ² (Model 2 – Kepercayaan Bisnis)	0,428	-	-	Model Fit

Hasil regresi menunjukkan bahwa korupsi sektor publik berpengaruh negatif signifikan terhadap iklim investasi ($\beta = -0.512$, $p < 0.001$) dan kepercayaan bisnis ($\beta = -0.473$, $p < 0.001$). Nilai R² sebesar 0.456 pada model pertama menunjukkan bahwa sekitar 45,6% variasi iklim investasi dapat dijelaskan oleh korupsi sektor publik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Sementara itu, nilai R² sebesar 0.428 pada model kedua menunjukkan bahwa 42,8% variasi kepercayaan bisnis dipengaruhi oleh korupsi publik, dengan arah hubungan negatif. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi di sektor publik, semakin rendah pula iklim investasi dan tingkat kepercayaan bisnis di Indonesia.

4.3 Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa korupsi publik memiliki dampak destruktif terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar (Mauro, 1995). Praktik korupsi memperbesar biaya transaksi, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menghambat efisiensi birokrasi yang pada akhirnya menurunkan minat investor (Posma, 2021).

Temuan ini konsisten dengan penelitian Triwibowo (2020) yang menggunakan analisis kointegrasi panel untuk membuktikan bahwa korupsi publik berhubungan negatif signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. Selain itu, Bachtiar (2024) menemukan bahwa desentralisasi yang tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik justru meningkatkan peluang korupsi di daerah, sehingga memperburuk kepercayaan investor terhadap pemerintah lokal.

Dari sisi sosial-ekonomi, hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Shidqi & Arfiansyah (2024) yang menyoroti peran pengendalian internal dan audit publik dalam menekan praktik korupsi di pemerintah daerah. Ketika mekanisme pengawasan berjalan efektif, persepsi publik terhadap integritas sektor publik meningkat, sehingga kepercayaan dunia usaha dapat pulih.

Selain itu, Maulidi et al. (2025) menjelaskan bahwa faktor budaya organisasi dan jarak kekuasaan (power distance) juga berpengaruh terhadap perilaku korupsi, di mana tingkat religiositas dapat menjadi faktor mediasi yang menekan kecenderungan perilaku koruptif. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan sistem, tetapi juga nilai-nilai moral dalam organisasi publik.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan. Untuk meningkatkan iklim investasi dan memperkuat kepercayaan bisnis, pemerintah Indonesia perlu memperkuat transparansi birokrasi, sistem audit publik, dan efektivitas lembaga anti-korupsi, sebagaimana disarankan oleh Transparency International (2024) dalam laporan Corruption Perceptions Index (CPI).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa pengendalian korupsi publik merupakan faktor krusial bagi stabilitas investasi dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Simpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi sektor publik terhadap iklim investasi dan kepercayaan bisnis di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap 150 responden menggunakan metode regresi linier berganda, diperoleh kesimpulan bahwa korupsi sektor publik memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kedua variabel tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi dalam birokrasi publik, semakin buruk persepsi dunia usaha terhadap stabilitas iklim investasi dan semakin menurun tingkat kepercayaan bisnis di Indonesia.

Temuan empiris menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi ($\beta = -0.512$) untuk iklim investasi dan ($\beta = -0.473$) untuk kepercayaan bisnis memiliki tingkat signifikansi di bawah 0.001, menandakan hubungan negatif yang kuat. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0.456$ dan $R^2 = 0.428$) mengindikasikan bahwa korupsi sektor publik menjelaskan hampir setengah dari variasi kondisi investasi dan persepsi kepercayaan bisnis di Indonesia. Hasil ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Mauro (1995) bahwa korupsi menimbulkan market inefficiency dan menurunkan produktivitas ekonomi melalui distorsi kebijakan publik.

Secara konseptual, penelitian ini mempertegas model hubungan antara tata kelola pemerintahan, korupsi, dan iklim investasi sebagaimana dibahas dalam penelitian Triwibowo (2020) dan Posma (2021), yang sama-sama menegaskan bahwa perilaku koruptif dalam administrasi publik menghambat arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment). Penelitian ini juga memperkuat hasil temuan Bachtiar (2024) yang menunjukkan bahwa proses desentralisasi tanpa transparansi meningkatkan potensi korupsi daerah yang berimplikasi negatif terhadap kepercayaan pelaku bisnis terhadap pemerintah lokal.

Selain itu, hasil ini juga memiliki relevansi sosial. Shidqi dan Arfiansyah (2024) menyatakan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik serta sistem audit internal yang efektif dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi publik. Hal ini konsisten dengan penelitian Maulidi et al. (2025) yang menemukan bahwa budaya organisasi dan tingkat religiositas memiliki peran mediasi dalam menekan perilaku koruptif. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa perbaikan tata kelola publik tidak hanya memerlukan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga integritas moral dan budaya organisasi yang transparan.

Dari perspektif makroekonomi, hasil penelitian ini mendukung laporan Transparency International (2024) yang menempatkan Indonesia pada posisi menengah dalam Corruption Perceptions Index (CPI). Hal ini menandakan bahwa meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, masih terdapat tantangan struktural dalam reformasi birokrasi, terutama pada tingkat pelayanan publik daerah. Oleh karena itu, peningkatan iklim investasi yang kondusif dan pemulihan kepercayaan bisnis sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam menekan korupsi publik secara sistemik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa korupsi publik bukan hanya persoalan etika, tetapi juga determinan utama dalam efisiensi pasar, persepsi risiko investasi, serta keberlanjutan ekonomi nasional. Pemberantasan korupsi

bukan semata upaya hukum, melainkan strategi pembangunan ekonomi yang krusial bagi stabilitas dan kepercayaan pasar terhadap Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi praktis dan akademik yang dapat dijadikan masukan. Pertama, bagi pemerintah pusat dan daerah, diperlukan peningkatan transparansi administrasi publik dan reformasi sistem perizinan investasi melalui digitalisasi layanan publik untuk mengurangi peluang interaksi tatap muka yang rawan korupsi. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi World Bank (2023) yang menegaskan pentingnya e-governance sebagai sarana efektif dalam menekan praktik koruptif di negara berkembang.

Kedua, perlu adanya penguatan lembaga audit internal dan pengawasan publik sebagaimana diusulkan oleh Shidqi & Arfiansyah (2024) untuk memastikan integritas keuangan dan keandalan pelaporan pemerintah daerah. Pemerintah juga harus memperluas peran whistleblower system dan menerapkan sanksi administratif yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika birokrasi.

Ketiga, dari sisi dunia usaha, penting bagi pelaku bisnis untuk mendorong penerapan good corporate governance (GCG) dan compliance system internal agar dapat menciptakan kolaborasi yang etis antara sektor publik dan swasta. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha ini dapat menumbuhkan kepercayaan publik dan memperbaiki citra investasi Indonesia di mata internasional.

Sementara itu, bagi peneliti akademik, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai moderasi dan mediasi variabel budaya organisasi, digitalisasi layanan publik, dan religiositas terhadap korupsi sektor publik. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperluas sampel dan menggunakan metode panel data regression agar dapat menangkap dinamika korupsi publik antarwilayah dan antarwaktu.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang penting bagi upaya pemberantasan korupsi dan penguatan kepercayaan bisnis di Indonesia. Pemerintah, akademisi, dan sektor swasta harus bergerak bersama dalam membangun sistem tata kelola publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, R. (2024). The impact of decentralisation on public sector corruption in Indonesia. *Public Journal of Indonesian Administration and Policy*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2255>
- Maulidi, A., Girindratama, M. W., Soeherman, B., & Andono, F. A. (2025). Organizational culture, power distance and corruption: The mediating role of religiosity. *The Indonesian Accounting Review*, 14(2). <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i2.4795>
- Posma, S. J. K. (2023). The Effect of Corrupt Behavior on the Flow of Foreign Direct Investment to Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*. DOI available at <https://apfjournal.or.id>
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2024). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>
- Triwibowo, S. (2023). Public Financial Management and Corruption in Indonesia: A Panel Cointegration and Causality Analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(3). <https://doi.org/10.22146/jieb.50719>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.2307/258792>
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change, and economic performance. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Stern, N. (2002). The investment climate, governance, and inclusion in the world economy. World Bank Policy Paper.
- Sztompka, P. (1999). Trust: A sociological theory. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511659942>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2021). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024: Indonesia Country Report. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
- World Bank. (2023). Strengthening E-Governance to Reduce Corruption in Emerging Economies. Washington, DC: World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1971-3>